

**PENGARUH KOMUNIKASI EKSTERNAL ORGANISASI  
TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG  
KAKI LIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2010 KOTA PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS  
UNP Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh :**

**SHENDY DESTRIA  
NIM. 1301944 / 2013**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap  
Tingkat Pemahaman Pedagang Kaki Lima Atas  
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 di Kota  
Payakumbuh

Nama : Shendy Destria

Nim : 1301944

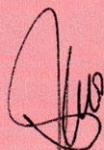
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Juni 2017

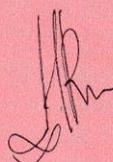
Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D  
NIP. 1963401 198903 1 003

**Pembimbing II**



Nora Eka Putri, S.IP, M.Si  
NIP. 19850312 200812 2 006

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

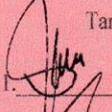
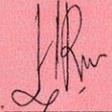
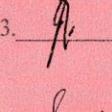
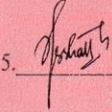
Pada hari Rabu, Tanggal 7 Juni 2017 Pukul 10.00 s/d 11.30 WIB

**Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap Tingkat Pemahaman Pedagang Kaki Lima Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 di Kota Payakumbuh**

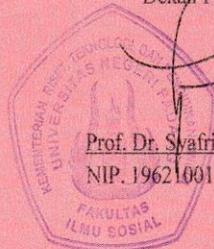
Nama : Shendy Destria  
NIM : 1301944  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Juni 2017

**Tim Penguji**

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	1. 
Sekretaris : Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	2. 
Anggota : Dr. Dasril, M.Ag	3. 
Anggota : Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	4. 
Anggota : Siska Sasmita, S.IP, MPA	5. 

Mengesahkan  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

# PERSEMBAHAN

Saat lembar ini ku tulis dengan goresan tinta yang dimulai dengan ucapan “Alhamdulillah” Terima Kasih Tuhan untuk semua nikmat, rahmat dan kasih sayangMu dan semua hadiah yang telah Engkau berikan, dan ini salah satu hadiah atas perjuangan yang selama ini ku jalani, dengan tetesan air mata dan keringat yang sebelumnya tertumpah diwajahku dan akhirnya keindahan dan janjiMu selalu pasti, bahwa dibalik “Kesulitan pasti ada Kemudahan” walau terkadang aku merasa malu atas dosa-dosaku, namun Engkau selalu memberikan nikmatMu dan mengabdikan salah satu Do’a dan pintaku.

Skripsi Kupersembahkan kepada...

Kedua orang tua, terima kasih Papa, Mama untuk doa dan kasih sayang kalian, terima kasih telah mengajarkan arti kata tegar, terima kasih pa telah mendidikku dan menguruhkanku untuk tetap kuat di kehidupan yang ku jalani, tanpa doa dan kasih sayang kalian aku bukanlah apa-apa.

Saudara-saudaraku tersayang, kak Nisha Florinda, Kak Rio Rizky Nanda dan adekku tersayang Fadhzi Arya Putra terima kasih atas canda tawa kalian yang tersimpan di memori dan membuat ku tetap enjoy menjalani kehidupan, terima kasih untuk setiap tingkah kongolnya. Ketahuilah walau terkadang kita sering berkonflik tapi sayang dan cintaku takkan pudar.

Dosen-Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, trimakasih untuk setiap ilmu yang telah kalian jejalkan. Dosen-Dosen pembimbing dan penguji, Bapak Drs. Syamsir, M.Si Ph.D, Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Dasril M.Ag, Bapak Aldri Frinaldi S.H, M.Hum, Ph.D, Ibu Siska Sasmita, S.IP, MPd trimakasih telah turut memberikan kontribusi yang begitu besar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Sahabat-sahabat terbaikku atau orang bilang geng 4b2o terima kasih untuk tetap setia dari awal pertama aku menginjakkan kaki di UNP, kalian membuat hidup ku lebih berwarna, memberikan semangat saat menggarap

skripsi, teristimewa terima kasih untuk sahabat ku Lidya Rigan Utariz yang telah mau rela ikutan bergadang dan banyak mengajarkan ku saat pengolahan data skripsi dan juga Dede Santika yang telah memperbolehkan ku tidur di kamar kosannya wkwkwkwk. Buat kamu Digna Kasandra gak tau mau bilang apa, teman dari SD sempat terpisah SMP dan SMA dan dipertemukan di bangku perkuliahan dan senantiasa memberikan dukungan bahwa dia percaya aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Buat kamu bolot sayangku Elsa Tri Monika yang senantiasa selalu ada disaat aku membutuhkan bantuan. Love love dan kiss buat kalian semua.. wkwkwk...

Tak terlupakan juga ucapan terima kasih untuk bang Afdhal Rasyid senior yang tak sekdar senior biasa, yang telah mengajarkan saya SPSS dan sedia mendengarkan keluhan saya saat pengolahan data,.. Thankyou bang

And then untuk yang teristimewa thank's you verry much uda Delta Bima Mulya yang pengorbananmu luar biasa, kesbaranmu yang tak terhingga, mengemanku saat melakukan penelitian di kota yang sebelumnya belum pernah ku kunjungi, mengajarkan ku keberanian saat berkomunikasi dengan orang pasar yang berasal dari berbagai macam watak dan karakter. Tak hanya itu setiap pulang dari lokasi penelitian cuaca selalu hujan, namun aku tetap bersyukur karena Tuhan selalu memberikan aku dan dia kesehatan.

Sahabat-sahabatku UNION terima kasih untuk kenyamananya, walau kita udah mungkin hampir 4 tahun gak selalu bareng tp tetap memberikan kenyamanan untukku. Suci Khairani, Reno Yufira tetap semangat garap skripsinya. Rekan-rekan yang ada di Pokja IV PBB Padang Selatan yang sangat memberikan pengertian dan perhatian yang sangat luar biasa. Rekan-Rekan Ilmu Administrasi Negara 2013 terima kasih untuk segala hal, canda tawa dan pengalaman yang selama ini ku lewati...

Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua yang tidak sempat disebutkan satu persatu di sini.

Salam Sukses,

Shendy Destria

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shendy Destria

Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 24 Desember 1995

NIM : 2013/1301944

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul *"Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap Tingkat Pemahaman Pedagang Kaki Lima Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 Di Kota Payakumbuh"* adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di Institusi UNP maupun di masyarakat dan negara

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah

Padang, 21 Juli 2017

Saya yang menyatakan



**Shendy Destria**  
2013/1301944

## ABSTRAK

### **SHENDY DESTRIA : NIM 2013/1301944 Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi terhadap Tingkat Pemahaman Pedagang Kaki Lima atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 Kota Payakumbuh.**

Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat adanya masalah komunikasi eksternal organisasi (Dinas Koperindag UMKM) Kota Payakumbuh kepada pedagang kaki lima, sebab informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, dan juga informasi tersebut tidak langsung disampaikan kepada PKL. Latar belakang dilakukannya penelitian ini juga karena masih terdapat komunikasi eksternal organisasi yang masih kurang baik kepada pedagang kaki lima atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi terhadap Tingkat Pemahaman Pedagang Kaki Lima atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 Kota Payakumbuh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di pasar pusat Kota Payakumbuh. Pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *Propotional Random Sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 245 orang. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan skala pengukuran skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana.

Dari analisis data yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi eksternal organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pemahaman PKL dengan nilai signifikansi 0,00. Nilai Adjust R Square 0,148. Hal ini berarti pengaruh variabel komunikasi eksternal organisasi terhadap tingkat pemahaman PKL atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 sebesar 14,8 %. Sedangkan sisanya 85,2 % dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya nilai R yang dihasilkan sebesar 0,389 yang berarti kekuatan pengaruh variabel komunikasi eksternal organisasi mempengaruhi tingkat pemahaman PKL atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 sebesar 38,9 %.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bagi Dinas Koperindag UMKM Kota Payakumbuh agar lebih memperhatikan pedagang kaki lima, menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dan meningkatkan komunikasi persuasif kepada pedagang kaki lima, karena komunikasi eksternal organisasi masih berada dikategori rendah. Sehingga perlu ditingkatkan lagi menjadi lebih efektif. Pemahaman PKL masih berada dalam kategori cukup/sedang. Semoga dengan ditingkatkannya komunikasi eksternal organisasi maka pemahaman PKL atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 menjadi meningkat.

**Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Komunikasi Eksternal Organisasi, Pemahaman**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufiknya dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi terhadap Tingkat Pemahaman Pedagang Kaki Lima atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 Kota Payakumbuh”**.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Nora Eka Putri S.IP, M.Si selaku pembimbing II.
4. Bapak Dr. Dasril, M.Ag, Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D, dan Ibu Siska Sasmita, S.IP, MPA selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Agus Rubiono, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Diskoperindag Kota Payakumbuh beserta staf.

8. Ibunda dan ayahanda yang penulis cintai, putri dari Ibu Ferina dan Jon Arnes yang telah memberikan support, kasih sayang, dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah di dalam penyelesaian skripsi, serta kedua kakak dan adik penulis yang memberikan support di dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis sayangi dan cintai.
10. Teman spesial "*best friend / uda*" Delta Bima Mulya yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil serta yang senantiasa menemani penulis saat melakukan penelitian di lokasi penelitian.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Lidya Riyan Utarie, Digna Kasandra, Dede Santika, Siska Septia Zuganda, Meiza Fitri Rahma Deni (4b2o) yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil. Serta teman-teman dekat lainnya yang tidak disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi ataupun bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan – rekan mahasiswa seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2013, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Padang, Mei 2017

Penulis

**Shendy Destria**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Komunikasi Organisasi .....	13
B. Komunikasi Eksternal Organisasi .....	16
C. Pemahaman Pedagang Kaki Lima.....	29
D. Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap Tingkat Pemahaman .....	38
E. Penelitian Relevan .....	40
F. Kerangka Konseptual .....	42
G. Hipotesis Penelitian .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Operasionalisasi Variabel dan Variabel Penelitian .....	45
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	47
E. Jenis, Teknik dan Sumber Data .....	50
F. Instrumen Penelitian .....	51
G. Validitas dan Reliabilitas .....	52
H. Teknik Analisis Data .....	58

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	64
B. Temuan Khusus .....	78
C. Pembahasan .....	101
D. Keterbatasan Penelitian .....	111

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL2016.....	5
Tabel 1.2 Jumlah PKL yang melakukan pelanggaran .....	7
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Satpol PP .....	7
Tabel 1.4 Jumlah PKL yang tergabung dalam APKL .....	8
Tabel 3.2 Jumlah Sampel .....	50
Tabel 3.3 Skala Likert .....	52
Tabel 3.4 Uji Validitas Variabel Komunikasi Eksternal Organisasi .....	53
Tabel 3.5 Uji Validitas Variabel Pemahaman.....	54
Tabel 3.6 Tingkat Reliabilitas .....	55
Tabel 3.7 Uji Reliabilitas Variabel Komunikasi Eksternal Organisasi .....	56
Tabel 3.8 Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman .....	57
Tabel 3.9 Uji Reliabilitas Variabel (X) dan (Y) secara keseluruhan .....	57
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	72
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	72
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Jadi PKL.....	73
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan .....	74
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan .....	75
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	76
Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Bersih .....	77
Tabel 4.16 Deskripsi Variabel Komunikasi Eksternal Organisasi.....	84
Tabel 4.21 Deskripsi Variabel Pemahaman .....	89
Tabel 4.22 Uji Kolmogorov-Smirnov .....	92
Tabel 4.23 Uji Linearitas.....	94
Tabel 4.24 Hasil Autokorelasi.....	96
Tabel 4.25 Model Summary .....	97
Tabel 4.26 Anova .....	97
Tabel 4.27 Hasil Uji Regresi Sederhana .....	99
Tabel 4.28 Koefisien Korelasi.....	100

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh .....	68
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	91
Gambar4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	93
Gambar 4.3 Hasil Uji Linearitas .....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam melakukan aktivitas manusia, manusia hidup berkomunikasi dengan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial. Semakin berkembang kehidupan manusia, peranan komunikasi menjadi hal penting untuk kepentingan interaksi, menjalin kerja sama dengan orang lain, dan memecahkan masalah. Di dalam menyelesaikan masalah Pemerintah daerah sebagai aktor dalam kebijakan harus membuat suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di suatu daerah tertentu. Ukuran keberhasilan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi (Budi Winarno, 2013:162). Salah satu kebijakan yang telah dibuat untuk mengurangi atau memecahkan masalah tersebut yaitu dengan dibuatkan suatu peraturan daerah.

Peraturan daerah dijadikan sebagai salah satu cara di dalam meminimalkan masalah yang ada. Masalah yang masih belum bisa diatasi adalah pengangguran, karena masih terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga membuat masyarakat lebih memilih membuka usaha sendiri dan menjadi pedagang. Pedagang menurut Damsar (1997:106) adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Pedagang kaki lima masuk ke dalam kategori jenis pedagang retail. Pedagang kaki lima menurut Perda Nomor 9 tahun 2010 pasal 1 diartikan sebagai pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah

daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kebijakan penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima di pasar kota Payakumbuh itu telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan/pedagang kaki lima malam. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang penetapan lokasi berjualan, luas tempat usaha, pembinaan, tata cara pengurusan izin serta kewajiban dan larangan yang harus ditaati dan dilakukan oleh pedagang kaki lima (Perda Nomor 9 tahun 2010). Di dalam menjalankan peraturan daerah tersebut ini menjadi tugas dan wewenang oleh dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota Payakumbuh dengan kerja sama oleh instansi terkait di dalam melaksanakan serta mensosialisasikan peraturan daerah kepada pedagang kaki lima. Peraturan daerah tersebut dijelaskan sejumlah aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap pedagang kaki lima di kota Payakumbuh. Baik pedagang kaki lima yang berjualan di siang hari maupun pedagang kaki lima yang berjualan di malam hari. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang kaki lima malam, pedagang mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin.

Tapi kenyataan berbanding terbalik dengan yang semestinya. Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima /atau Pedagang Kaki Lima Malam akan tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Khususnya di pasar pusat kota Payakumbuh masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran dari peraturan tersebut beragam alasan diantaranya, masih terbatasnya informasi yang diterima oleh PKL, adanya perbedaan pandangan atau/

persepsi dari pedagang tentang penataan pasar pusat kota Payakumbuh., ketidaktahuan akan peraturan daerah atau belum tersosialisasikannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 ini dengan baik ke seluruh pedagang kaki lima yang menempati daerah atau lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan kota Payakumbuh. Tidak hanya itu, sering kali dijumpai para PKL yang masih sering berjualan bukan pada tempatnya, pada saat peneliti melakukan obeservasi awal di dapati bahwa ada pedagang kaki lima malam yang berjualan di luar waktu berjualan. Seharusnya pedagang kaki lima malam memulai berjualan pada pukul 16.00 wib (jam 4 sore). Namun kenyataanya pedagang kaki lima malam telah berjualan pada pukul 15.00 wib. Ada juga beberapa pedagang yang menggelar, menempatkan maupun menumpuk barang dagangannya di atas bahu jalan, trotoar, maupun jalanan umum. Selain itu, masih banyak juga para pedagang kaki lima yang tidak membongkar atau memindahkan barang dagangannya setelah usai berjualan, dan bahkan ada yang berjualan dengan bangunan yang permanen. Bahkan saat peneliti melakukan observasi beberapa bulan kemudian, didapati adanya pedagang buah yang berjualan sedikit maju ke depan dari area yang seharusnya berlaku, dan juga berdasarkan data dari (hasil wawancara dengan kepala Diskoperindag UMKM Bidang Pasar, 2016) hanya sekitar 180 PKL yang memiliki izin penempatan usaha, dan sisanya PKL tersebut tidak memiliki izin penempatan usaha atau tidak teregritasi pada dinas terkait. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman, serta pengetahuan yang masih kurang tentang aturan mengenai pengelolaan PKL di kota Payakumbuh.

Dilihat dari belum tersosialisasikannya peraturan daerah dengan baik, karena terbatasnya jumlah anggota /personil bidang pengelolaan pasar telah memberi dampak kepada pedagang kaki lima kota Payakumbuh dalam melakukan usaha di sektor informal. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima seperti berjualan di tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah Kota Payakumbuh (Dinas Koperasi dan UMKM). Dinas Koperasi dan UMKM (Diskoperindag) harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Satpol PP dan Damkar di dalam permasalahan pedagang kaki lima di pasar Payakumbuh sehingga tujuan dari Perda Nomor 9 Tahun 2010 dapat terlaksana dengan baik. Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota Payakumbuh hanya mensosialisasikan peraturan daerah dengan kelompok asosiasi pedagang kaki lima, tidak ke pedagang kaki lima secara keseluruhan.

Di dalam proses penyelesaian yang dilakukan oleh bidang pengelolaan pasar kepada para PKL yang melakukan pelanggaran itu selalu diadakan dengan cara penyelesaian di tempat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala bidang pengelolaan pasar, bahwasanya komunikasi yang dilakukan pemerintah kota kepada para pedagang yang melakukan pelanggaran dilakukan komunikasi secara persuasif, apabila ada yang melanggar akan diberikan surat teguran dan apabila tidak adanya respons selama 2x24 jam maka dilakukan dengan cara bongkar tempat usahanya serta pedagang yang melanggar diberikan sanksi berupa uang ganti rugi kepada dinas pasar sesuai dengan jenis usaha dan dagangannya (hasil wawancara, 2016). Dengan cara seperti itu tidak membuat pedagang kaki lima untuk jera melakukan pelanggaran, karena tidak adanya bukti bahwa mereka sudah pernah melakukan pelanggaran, dan juga tidak adanya aparat yang mencatat

berapa banyak pedagang yang sudah melakukan pelanggaran sehingga tidak membuat pedagang tersebut jera untuk berhenti melakukan pelanggaran.

Tidak bisa dipungkiri banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat dalam pelaksanaan dan penerapan Perda tersebut antara lain kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh Diskoperindag kepada PKL yaitu karena terbatasnya personil atau anggota dari dinas Koperindag di dalam penyampaian informasi maupun melakukan pendekatan persuasif kepada PKL yang melanggar.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai bidang Pengelolaan Pasar dan PKL**

UNSUR	JUMLAH
Pegawai Dinas KOPERINDAG (bidang pengelolaan pasar)	25 orang PNS
	26 orang THL
Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh	2261 orang

*(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh Tahun 2016)*

Tak hanya itu di dalam melaksanakan kebijakan penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima masih terdapat keterbatasan dan permasalahan dalam hal komunikasi. Jika komunikasi yang di bangun oleh pemerintah cukup baik, maka akan menyebabkan keberhasilan dalam penataan pasar. Komunikasi yang sering dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini menjadi tanggung jawab bidang pengendalian pasar, saat saya mewawancarai beliau mengatakan bahwa

“Pemerintah saat melakukan pertemuan dengan itu hanya melalui surat undangan rapat, dan memang kami hanya melakukan pertemuan dengan ketua asosiasi saja. Menurut kami saat diadakan pertemuan dengan perwakilan asosiasi PKL kami rasa sudah cukup membantu di dalam penyampaian informasi kepada PKL”

Komunikasi secara konseptual diartikan sebagai suatu proses rangkaian kegiatan penataan, berupa penyampaian informasi, baik berupa suara, lambang, dari satu orang atau beberapa orang kepada pihak lain untuk tujuan tertentu (Inu

Kencana, 2006: 59). Publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara (Inu Kencana, 2006: 17). Komunikasi eksternal organisasi adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media.

Permasalahan komunikasi yang tampak pada penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima yang peneliti temukan di berita online (haluanonline, 2016) yang mana isi berita tersebut yaitu ratusan pedagang kaki lima (PKL) datang ke kantor DPRD Payakumbuh lantaran kekecewaan mereka kepada pemerintah. PKL menyebut bahwa lokasi yang disiapkan oleh pemerintah kota Payakumbuh melalui Diskoperindag tidak sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah saat menjalin komunikasi dengan pedagang. Ini merupakan salah satu indikasi kegagalan Pemkot Payakumbuh dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi saat melaksanakan suatu kebijakan penataan pasar, salah satunya di dalam indikator penerima pesan. Sebab penyampaian informasi dan pesan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Keluhan dari pedagang yang direlokasi tersebut langsung ditanggapi oleh pemerintah, yang mengatakan relokasi sudah menjadi harga mati, seperti yang dikutip di (Pemkot Payakumbuh, 2016).

“Pedagang kaki lima yang akan direlokasi ke terminal nantinya akan berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Pemandangan tersebut sudah menjadi harga mati, karena sosialisasi relokasi PKL sudah dilakukan sejak setahun. Ini tidak akan menimbulkan persoalan lagi. Karena sudah dilakukan pertemuan dengan para perwakilan pedagang beberapa kali oleh Pemko. Dalam pertemuan terakhir, pekan kedua Januari lalu, perwakilan pedagang yang dipimpin Ketua APKL H. Nursyirwan, Ketua IP3 H. Esa Musardani, Ketua Organda Amri, Ketua SPSI Basril Abas, sepakat untuk pindah ke terminal angkot. Dalam catatan Diskoperindag, tercatat kurang lebih 150 PKL yang akan direlokasi ke terminal angkot. Mereka selama ini, menempati gang-gang di kawasan pasar bertingkat blok barat dan blok timur.

Kadiskoperindag Dahler pun, menjamin, pihaknya bersama mitra kerjanya, seperti Dishubkominfo, Satpol PP dan petugas kepolisian dan TNI yang tergabung dalam tim pemindahan, akan mengamankan daerah yang ditinggal PKL”.

**Tabel 1.2**  
**PKL yang melakukan pelanggaran dan demonstrasi ke kantor DPRD Kota Payakumbuh**

JENIS USAHA	JUMLAH
Pedagang Pasar Buah	40 (empat puluh ) PKL
Pedagang Jufri / samping Rambuti	28 (dua puluh delapan) PKL
Pedagang Samping Gumarang	32 (tiga puluh dua )PKL

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh Tahun 2016)

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Satpol PP**

UNSUR	JUMLAH
Pegawai SATGAS Polisi Pamong Praja	48 (empat puluh delapan) orang
Pegawai Kontrak	71 (tujuh puluh satu) orang

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2017)

Adanya menjalin komunikasi dengan organisasi lain seperti dengan pihak satuan polisi pamong praja (Satpol PP) belum dapat mengatasi permasalahan PKL, sebab pemerintah kota Payakumbuh tidak pernah melakukan pertemuan dengan para pedagang secara keseluruhan di dalam kebijakan relokasi untuk penataan pasar, pemerintah kota Payakumbuh hanya melakukan pertemuan dengan ketua asosiasi, tidak kepada seluruh pedagang kaki lima yang ada di pasar pusat Payakumbuh. Interaksi yang kurang baik terlihat ketika belum efektifnya kerja sama dan dialog yang dilakukan pemerintah kota Payakumbuh saat melakukan pendekatan dengan para pedagang yang dinilai masih kurang baik, lantaran adanya kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh PKL ke kantor DPRD. Tidak hanya itu saat peneliti mewawancarai salah seorang pedagang pakaian yang di relokasi, mereka mengatakan bahwa setiap informasi yang disampaikan dari

dinas koperasi perdagangan industri dan perdagangan, hanya disampaikan melalui APKL. Padahal mereka mengatakan tidak semua pedagang yang bergabung ke dalam kelompok asosiasi tersebut. Seringkali mereka tidak mendapatkan informasi apa saja dari Diskoperindag UMKM kota Payakumbuh. Sehingga terkadang mereka terkejut bahkan tidak mengetahuinya saat adanya perubahan-perubahan aturan atau kebijakan dari pemerintah kota.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah PKL yang tergabung di dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh**

No.	Lokasi	Jumlah
1	Pasar Pusat Payakumbuh	350 PKL
2.	Pasar Ibu Kota Payakumbuh	1200 PKL
Jumlah		1550 PKL

(Sumber: Data dari Ketua APKL, 2017)

Berdasarkan data di atas dari ketua APKL Bapak H. Nusirwan bahwasanya PKL yang masuk ke dalam asosiasi PKL hanya 1550 orang PKL, sementara jumlah PKL sebanyak 2261 orang. Tidak heran terkadang mereka yang tidak tergabung ke dalam kelompok asosiasi ini tidak mengetahui apapun informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh kepada para pedagang.

Pemindahan lokasi berjualan yang dilakukan oleh Diskoperindag menimbulkan keluhan dan pengetahuan yang berbeda-beda dari para pedagang kaki lima. Sebab informasi yang peneliti dapatkan saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang pedagang kaki lima yang berjualan pakaian serta yang berjualan minuman. Pedagang pakaian menuturkan bahwa:

“ibuk disini sudah lama berjualan di pasar pusat Payakumbuh serta meneruskan usaha keluarga. Saat ibuk disuruh untuk pindah berjualan, ibuk menerimanya. Asalkan tempat baru yang disediakan pemerintah sesuai dengan yang ibuk harapkan. Namun kenyataan

tempat yg ibuk terima itu jauh dari apa yang ibuk bayangan ibuk. Lebih besar luas tempat dagangan ibuk yang lama dari pada yang sekarang. Pemerintah di dalam memberikan informasi tidak konsisten serta sering tidak adil di dalam pemberian informasi. Sebab informasi yang diberikan pemerintah sering kali melalui organisasi PKL, seperti APKL. Padahal tidak semua PKL yang tergabung ke dalam organisasi itu. Jadi komunikasi pemerintah masih belum bisa dikatakan baik, kalau tentang peraturan daerah ibuk tidak mengetahui karena informasi tidak sampai kepada seluruh PKL di pasar pusat Payakumbuh”.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah seorang pedagang minuman,

tentang penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh

Diskoperindag. Pedagang minuman tersebut mengatakan bahwa:

“Saya sudah enam tahun berjualan di pasar Payakumbuh dan menjadi PKL. Saya mengetahui tentang tempat-tempat lokasi yang diperbolehkan di dalam menjual barang dagangan. Mengetahui luas tempat dagangan, dan waktu berjualan. Menurut saya komunikasi pemerintah dengan PKL sudah belum dikatakan baik. Pemerintah sudah membagi-bagi tempat/lokasi untuk PKL berjualan, dalam pembagian-pembagian lokasi berjualan adanya rasa sikap yang kurang adil yang diberikan oleh pemerintah”.

Tidak hanya dari pedagang kaki lima saja yang peneliti wawancarai,

namun peneliti juga mewawancarai ketua asosiasi pedagang kaki lima (APKL)

beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 ini adalah permintaan dari seluruh pedagang kaki lima, yang meminta kepada DPRD untuk dibuatkan suatu peraturan untuk mereka saat berjualan di pasar Payakumbuh. Supaya mereka merasa aman di dalam berjualan. Jadi pedagang kaki lima di sini telah mengetahui tentang peraturan tersebut di dalam penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima”. Pemerintah kota Payakumbuh dalam menjalin komunikasi dengan pedagang dilakukan dengan menggunakan surat undangan rapat.”

Adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh pedagang dengan

ketua organisasi PKL tentang komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota

Payakumbuh serta pemahaman dari PKL tentang Peraturan Daerah Nomor 9 tahun

2010 mengenai kebijakan dari peraturan daerah pedagang kaki lima kota

Payakumbuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikutip dari Zahidah (2010:33) mengungkapkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman bermanfaat untuk menjadikan pedagang kaki lima lebih taat terhadap peraturan daerah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat tercapai.

Adanya kebijakan penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 diperlukan komunikasi yang baik dibangun pemerintah untuk meningkatkan pemahaman yang baik juga dari pedagang kaki lima. Namun saat ini karena kurangnya komunikasi yang baik serta pendekatan persuasif yang masih kurang dilakukan tak hayal masih banyak pedagang yang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan aturan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang “Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap Pemahaman Pedagang Kaki Lima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Kota Payakumbuh”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Belum optimal komunikasi yang dilakukan oleh dinas koperasi perdagangan dan perindustrian (Diskoperindag) UMKM kota Payakumbuh di dalam penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima.
2. Penyampaian informasi dan pesan dari Diskoperindag UMKM tidak sesuai dengan yang ada di lapangan dan yang dirasakan oleh pedagang kaki lima.
3. Adanya perbedaan pendapat dan pandangan dari masing-masing pedagang kaki lima tentang komunikasi Diskoperindag di dalam penataan pasar pusat kota Payakumbuh.

4. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 di kota Payakumbuh.
5. Kurangnya pemahaman pedagang kaki lima atas Perda Nomor 9 tahun 2010

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka penulis melakukan pembatasan masalah agar dapat mencapai sasaran. Pembatasan masalah yang dimaksud adalah **“Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap Pemahaman Pedagang Kaki Lima Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Kota Payakumbuh”**

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Apakah Terdapat Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap Pemahaman Pedagang Kaki Lima Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Kota Payakumbuh?

### **E. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Komunikasi Eksternal Organisasi Terhadap Pemahaman Pedagang Kaki Lima Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Kota Payakumbuh.

### **F. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara, khususnya mata kuliah komunikasi dan hubungan masyarakat (*public relation*)

### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Diskoperindag UMKM sebagai masukan dalam perbaikan menjalin komunikasi dengan pedagang kaki lima, mengetahui keinginan PKL serta sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan.
- b. Peneliti secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan sekaligus membandingkan dengan teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.